
**INFLASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PENGARUH
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH TANGERANG SELATAN**

Dila Angraini¹ dan Gyta Fitriandryany²
Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang
gfitriandryany@gmail.com

Diterima: Juli 2022; Direvisi: Agustus 2022; Dipublikasikan: November 2022

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of local taxes and levies on local revenue with a moderating variable, namely inflation in the city of South Tangerang in 2011-2020. The type of research used is quantitative by using data collection methods using secondary data. The sampling technique used is the saturated sample method, namely the method of determining the sample with the entire population as the research sample. The population in this study is the city of South Tangerang in 2011-2020. The results of the study prove that simultaneously and partially local taxes and regional levies have a positive and significant effect on local revenue. While inflation is not a moderating variable on the effect of local taxes and regional levies on local revenue

Keywords: Inflation, Regional Taxes, Regional Levies, Regional Original Income

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan variabel moderasi yaitu inflasi di kota tangerang selatan tahun 2011-2020. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data menggunakan data sekunder. Pendekatan pengambilan sampel yang digunakan adalah pendekatan pola jenuh, khususnya pendekatan mencari tahu pola dengan seluruh populasi karena pola studi. Populasi pada penelitian ini adalah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2011-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersamaan dan sebagian pajak daerah dan retribusi daerah memiliki dampak yang baik dan besar terhadap pendapatan daerah. Sementara inflasi tidak menjadi variabel moderasi pada dampak pajak lingkungan dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Kata kunci: Inflasi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang berpegang teguh pada prinsip desentralisasi dalam rangka penyelenggaraan kewenangan yang memberikan keserbagunaan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Melaksanakan ambisi otonomi daerah untuk mendongkrak pemenuhan kesejahteraan jaringan melalui inovasi, pelayanan, pemberdayaan jaringan dan partisipasi. Kekayaan ekonomi daerah, bersama-sama dengan yang dimiliki dan dikendalikan melalui pemerintah lingkungan, adalah penjualan lingkungan (Stefanus, 2020).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 pasal 285 ayat 1 pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah legal lainnya. Pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah juga dapat berkisar dari satu tempat ke tempat lain karena potensi yang unik. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu pengaturan kembali kapasitas penjualan yang mungkin mutlak disengaja dan diterapkan melalui pemerintah daerah.

Berikut merupakan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan 2011-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		
	Anggaran	Realisasi	%
2011	Rp 248.034.575.000,00	Rp 420.663.048.857,00	170%
2012	Rp 365.914.880.365,00	Rp 576.304.771.005,17	157%
2013	Rp 600.851.230.000,00	Rp 728.976.392.072,00	121%
2014	Rp 799.986.968.180,00	Rp 1.023.817.429.319,00	128%
2015	Rp 963.221.584.973,00	Rp 1.228.393.889.612,00	128%
2016	Rp 1.196.706.114.000,00	Rp 1.346.240.155.744,00	112%
2017	Rp 1.315.641.811.000,00	Rp 1.622.004.639.363,00	123%
2018	Rp 1.455.524.540.514,00	Rp 1.621.710.653.274,00	111%
2019	Rp 1.619.032.106.000,00	Rp 1.817.505.710.180,00	112%
2020	Rp 2.000.190.932.000,00	Rp 1.538.705.693.440,00	77%

Sumber : www.tangselkota.bps.go.id

Dari data sumber pendapatan asli daerah di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah Tangerang Selatan mengalami fluktuatif, tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu karena adanya pandemi covid19 yang sedang berlangsung, di hampir semua negara, yang berdampak pada semua sektor termasuk ekonomi. Sektor ekonomi di kota Tangerang Selatan sangat dibatasi oleh keberadaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dimana pendapatan daerah kota Tangerang Selatan turun 30% hingga 40% karena pandemi yang sedang terjadi sampai saat ini. Sektor yang paling terkena dampak penurunan pendapatan asli daerah di kota Tangerang Selatan adalah industri, kuliner dan hiburan. Agar pemerintah melakukan langkah-langkah mitigasi dalam pembayaran pajak daerah yaitu pemberian insentif berupa pembebasan dan pengurangan, serta penghapusan sanksi berupa denda dan keterlambatan pembayaran pajak daerah dampak covid-19. www.beritasatu.com

Menurut (Rizqy Ramadhan, 2019) pajak daerah adalah pungutan yang berasal dari jari jemari ke daerah yang pada pokoknya didasarkan sepenuhnya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat bersifat memaksa dan terutang melalui sarana wajib pajak tanpa menerima imbalan secara langsung, hasil yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai harga lokal dalam konteks perbaikan. pihak berwajib. Pajak daerah sebagai perwujudan pelibatan masyarakat dalam daerah pengembangan. Penjualan pajak daerah merupakan pasokan anggaran yang vital untuk peningkatan pembiayaan di daerah tersebut. Pencapaian rangkaian pajak ditentukan dengan menggunakan aspek kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan kemampuan petugas untuk melaksanakan tanggung jawabnya di

Dila Angraini¹ dan Gyta Fitriandryany² : Inflasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tangerang Selatan lapangan (Halim, 2014:171).

Pajak dan retribusi daerah merupakan suplai keuangan bagi suatu desa dalam mencapai peningkatan dan dukungan otoritas. Retribusi daerah sebagai imbalan atas layanan positif atau diberikan secara khusus dengan bantuan penggunaan pemerintah lingkungan untuk keuntungan orang atau badan (UU No. 28 Tahun 2009). (Halim, 2014:170) mendefinisikan bahwa selama berkaitan dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menilai, mengelola, dan memanfaatkan daerah; Sesuai dengan kondisi yang ada, penyaluran potensi pasokan pendapatan yang paling penting yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah kepada otoritas umum terdekat di Indonesia berasal dari sektor pajak dan retribusi terdekat. Pajak dan retribusi daerah merupakan suplai keuangan bagi suatu daerah dalam mencapai peningkatan dan dukungan otoritas. Kebijakan otoritas penting tentang otoritas lokal yang penting segera meminta pihak berwenang untuk mengubah urusan dalam negeri pribadinya. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus memiliki sistem kontrol yang cukup untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur peraturan yang sesuai telah diidentifikasi (galih wicaksono, 2017).

Peningkatan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan lama hidup sebuah pemerintahan sesuai dengan kemajuan negara, berdasarkan totalitas Pancasila dan UUD 1945 yang sering diukur dengan bantuan penggunaan rentang keuntungan riil yang dapat disesuaikan dengan modal. Penyebab peningkatan tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan nyata tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas. Produktivitas adalah perbandingan antara hasil kegiatan dan semua biaya untuk mewujudkan hasil tersebut. Pada generasi modern otonomi daerah dengan kewenangan yang lebih luas dalam melakukan perbaikan, fakta ini lebih berpusat pada perbaikan di dalam lokasi sangat dibutuhkan. Indonesia merupakan salah satu negara dunia di kawasan Asia yang mengalami bencana valas luar negeri yang kemudian menjadi bencana moneter utama.

Saldo biaya rupiah dari sudut dalam negeri panggilan untuk inflasi rendah atau 0, sementara pergi ke luar negeri dengan sistem perhitungan harga alternatif yang beragam saat ini, inflasi terlihat sebagai salah satu dari banyak faktor penentu harga alternatif dan mata uang luar negeri, rute merasakan efeknya sebagai akibat dari inflasi terutama pada saat di mana perbaikan lingkungan merupakan bagian penting dari perbaikan di seluruh negara yang diselesaikan terutama berdasarkan prinsip otonomi daerah dan undang-undang kekayaan negara yang menawarkan untuk meningkatkan demokrasi dan kinerja lokal.

Tingkat inflasi menjadi perhatian karena berdampak secara langsung terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Selain itu, inflasi juga merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh pemerintah maupun sektor swasta dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Laju inflasi yang terjadi di suatu negara merupakan metrik untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara. Inflasi tergantung berat atau tidaknya dibagi menjadi , yaitu inflasi ringan, tingkat inflasi dibawah 10%, inflasi sedang dari 10-30% per tahun, inflasi tinggi sebesar, tingkat inflasi dari 30-100% per tahun. Inflasi tinggi diatas 100% pertahun (*hyperinflasi*) (Nurasila et al., 2020).

Berikut adalah data inflasi tahunan di Tangerang Selatan, maka dapat terlihat bahwa angka inflasi di Selatan mengalami perubahan sejak tahun 2011 Inflasi di Tangerang selatan sebesar 5,13. Pada tahun 2012 dan 2013 Inflasi yang terjadi di Tangerang selatan cukup stabil yaitu 4,4-4,36. Terjadi peningkatan Inflasi yaitu di tahun 2014 sebesar 10,57 dan 2016 Inflasi turun kembali di angka 3,24. Inflasi di Tangerang Selatan yang pada tahun 2016 mencapai angka 2,61. Pada tahun 2018 dan 2019, angka inflasi di Tangerang Selatan cenderung stabil dan berkisar di angka 3,45-3,17. Dan pada tahun 2020 Inflasi di Tangerang Selatan berkisar di angka 1,58. Naik turunnya angka inflasi di Tangerang Selatan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi harga di wilayah Tangerang Selatan, namun juga dipengaruhi oleh keadaan nasional dan kebijakan pemerintah pusat. Misalnya banyak dipengaruhi oleh gejolak harga

bahan pangan, serta adanya kebijakan terhadap harga barang dasar yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti kenaikan tarif dasar listrik serta harga BBM.

Tabel 2 Tingkat Inflasi Daerah Tangerang Selatan, Banten, dan Indonesia

Tahun	INFLASI (%)		
	Tangsel	Banten	Indonesia
2011	5,13	3,45	3,79
2012	4,4	4,37	4,3
2013	4,36	9,65	8,38
2014	10,57	10,2	8,36
2015	3,24	4,29	3,35
2016	2,61	2,94	3,02
2017	3,26	3,98	3,61
2018	3,45	3,42	3,13
2019	3,17	3,3	2,72
2020	1,58	1,43	1,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan harus mampu mengatasi masalah keuangan yang dialaminya, ditambah dengan masalah inflasi yang dapat menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat yang hanya berdampak pada pendapatan lokal yang unik di dalam kota yakni Kota Tangerang Selatan sendiri.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan melalui (Oktiani, 2021) menyatakan bahwa sebagian penduduk memiliki dampak positif yang cukup besar pada keuntungan khas Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, inflasi tidak berdampak besar terhadap keunikan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penilaian terhadap studi yang dilakukan melalui (Deno et al., 2021) yang menyatakan bahwa pajak hiburan sebagian memiliki dampak besar pada penjualan di sekitar. Sementara itu, inflasi sebagian berdampak besar pada penjualan di sekitar.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Stakeholder*

Stakeholder pertama kali disampaikan melalui Stanford Research Institute (RSI) pada tahun 1963 melalui Freenam (1984). (Kivits & Sawang, 2021) mendefinisikan bahwa *Stakeholder* adalah perusahaan dan orang-orang yang memiliki kepentingan dalam aktivitas dan hasil perusahaan dan kepada siapa perusahaan tersebut bergantung untuk mencapai tujuan pribadinya. Prinsip *Stakeholder* adalah sekumpulan orang, jaringan atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun sebagian. yang sudah berkaitan dan kepentingan di lingkungan perusahaan (Putro, 2013).

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. pajak daerah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan. Bermanfaat untuk meningkatkan potensi sumber pendapatan daerah dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga pajak daerah memegang peranan yang relatif penting sebagai salah satu sumber utama pendapatan keuangan daerah di daerah. bagian (Ruswandi & Rina rahmawati, 2009).

Retribusi daerah merupakan salah satu pemberi keuntungan daerah. Oleh karena itu, pembelian Retribusi Daerah biasanya dianjurkan untuk menumbuhkan Pendapatan Asli Daerah (Rita Martini, 2018).

H1: Diduga Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah

2. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pasokan anggaran untuk membiayai perbaikan daerah, namun dalam prakteknya tidak cukup untuk berkontribusi pada pertumbuhan daerah, dibutuhkan pemerintah daerah untuk menemukan dan meningkatkan keuntungan daerah, terutama daerah. Pasokan keuntungan awal. (Hartono, 2017) menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan pasokan penting dari keuntungan daerah untuk membiayai tata kelola dan perbaikan daerah.

H2: Diduga Pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

3. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah yang tepat, menjadi salah satu aset untuk pembiayaan kembali pengelolaan pemerintahan dan meningkatkan daerah untuk pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan jaringan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah ditegaskan secara jauh bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah penjualan daerah untuk membayar penawaran atau kesulitan perijinan yang terutama diberikan atau dikeluarkan melalui pemerintah daerah setempat untuk keuntungan orang atau entitas hukum. Penelitian (Putri & Rahayu, 2019) menunjukkan bahwa sebagian retribusi daerah memiliki dampak yang cukup besar.

H3: Diduga Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan asli daerah

4. Inflasi memoderasi Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Ketika inflasi menyebabkan biaya produk dan penawaran meningkat, pendapatan asli daerah juga dapat tumbuh karena harga pajak yang dikenakan oleh otoritas juga meningkat karena harga pasar yang lebih tinggi. Namun di sisi lain, inflasi juga dapat menyebabkan sebaliknya. Ketika harga barang atau jasa meningkat, beberapa kelompok orang akan menghilangkan konsumsinya, baik untuk kebutuhan pokok, terutama kebutuhan sekunder dan Tersier. Hal ini juga terjadi pada warga kota Tangerang Selatan, sehingga efek inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan lokal. Meskipun ada orang konsumsi tidak menurun bahkan meningkat ketika inflasi terjadi tetapi tidak meningkat atau berpengaruh pada pendapatan asli daerah, yaitu karena produk atau layanan yang digunakan oleh objek tidak kena pajak yang melintas langsung ke daerah-daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, bersama dengan pajak hotel, restoran, kenikmatan, parkir, dll, yang kedalaman asupannya masih cukup rendah dibandingkan dengan item moneter dari tagihan pajak yang tidak mengunjungi daerah tetapi ke tengah atau provinsi.

Dalam penelitian yang dilakukan melalui (Oktiani, 2021) disebutkan bahwa secara parsial inflasi tidak berdampak besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penilaian terhadap penelitian yang dilakukan melalui (Deno et al., 2021) yang menyatakan bahwa pendapatan pajak secara pasial atau individual memiliki dampak yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, inflasi secara pasial atau individual memiliki dampak besar pada penjualan lingkungan.

H4 : inflasi memoderating Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

5. Inflasi memoderasi Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Peacock dan Wiseman dalam (Guritno, 2008) berpendapat bahwa otoritas mempertahankan pertumbuhan belanja otoritas bahkan ketika masyarakat umum enggan membayar retribusi yang tumbuh untuk membiayai belanja otoritas. Gagasan ini terutama didasarkan sepenuhnya pada gagasan di mana manusia memiliki tahap toleransi, terutama sejauh mana manusia dapat memahami jumlah retribusi yang diinginkan melalui otoritas untuk

membiayai pengeluaran otoritas. Jika tahap ini terlampaui, maka akan terjadi inflasi.

Dalam penelitian yang dilakukan melalui (Oktiani, 2021) disebutkan bahwa secara parsial inflasi tidak berdampak besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penilaian terhadap penelitian yang dilakukan melalui (Deno et al., 2021) yang menyatakan bahwa pajak hiburan secara pasial atau individual memiliki dampak yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, inflasi secara pasial atau individual memiliki dampak besar pada penjualan lingkungan.

H5 : inflasi memoderating Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan data kuantitatif. Menurut (Duli, 2019:3) studi kuantitatif adalah kepentingan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyampaikan catatan terutama berdasarkan jumlah atau variasi yang dicapai secara objektif untuk menyelesaikan suatu masalah atau melihat suatu spekulasi untuk memperluas mode. prinsip. Kedekatan studi dicapai melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan. Jenis arsip yang digunakan adalah arsip sekunder, terutama arsip yang diperoleh dalam bentuk tempel, dapat berupa arsip informasi dan keuangan Pemerintah Daerah selain arsip yang berkaitan dengan penelitian..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji t

Tabel 3 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.792798	0.424835	-1.866129	0.1113
Pajak Daerah	0.968624	0.017451	55.50390	0.0000
Retribusi Daerah	0.073092	0.018212	4.013455	0.0070
Inflasi	-0.002484	0.002545	-0.976161	0.3667

Sumber: *Output Eviews 10, 2022*

Hasil dari uji hipotesis di atas, kesimpulan berikut dapat ditarik:

- 1) Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Dilihat dari hasil uji-t di atas, t-hitung adalah 55,50390 > dari harga t-tabel 2,3646, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga pendapatan pajak daerah berdampak pada pendapatan asli Kota Tangerang Selatan 2011-2020.
- 2) Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Dilihat dari hasil uji-t di atas diperoleh t-hitung sebesar 4.013455 > dari harga t-tabel sebesar 2.3646 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga retribusi daerah berdampak pada pendapatan asli Kota Tangerang Selatan 2011-2020.

Uji f

Tabel 4 Hasil Uji f

R-squared	0.999091	Mean dependent var	27.70900
Adjusted R-squared	0.998636	S.D. dependent var	0.496912
S.E. of regression	0.018352	Akaike info criterion	-4.868962
Sum squared resid	0.002021	Schwarz criterion	-4.747928
Log likelihood	28.34481	Hannan-Quinn criter.	-5.001736
F-statistic	2197.399	Durbin-Watson stat	2.791719
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *Output Eviews 10, 2022*

Berdasarkan tabel di atas, nilai F yang dihitung adalah 2197.399, lebih tinggi dari nilai F tabel sebesar 4.7374. Karena nilai F yang dihitung lebih besar dari F tabel, maka Ho

Dila Angraini¹ dan Gyta Fitriandryany² : Inflasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tangerang Selatan ditolak atau hipotesis yang diajukan diterima. Hasil dari pemeriksaan statistik F diperoleh nilai F hitung dengan derajat besar 0,000 yang berarti semua variabel independen (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) secara serentak berpengaruh terhadap variabel terstruktur (Pendapatan Asli Daerah) pada derajat kepentingan = 5%. Besarnya dampak juga terlihat dari besarnya nilai F (0,00) < 0,05. Hasil dari versi regresi menunjukkan bahwa ada dampak dari pajak daerah dan retribusi daerah pada pendapatan asli daerah secara bersamaan.

MRA

Tabel 5 Hasil Uji moderasi 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.570421	2.420412	0.235671	0.8215
Pajak Daerah	0.984636	0.087650	11.23377	0.0000
Inflasi	-0.161709	0.534744	-0.302405	0.7726
Moderasi1	0.005974	0.019484	0.306622	0.7695

Sumber: *Output Eviews 10, 2022*

Berdasarkan hasil uji MRA, menunjukkan bahwa inflasi tidak memodernisasi pajak daerah atas pendapatan asli daerah dengan koefisien regresi nilai perkalian pajak daerah dengan inflasi 0,005974 dan nilai signifikan 0,7696 > 0,05. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa inflasi tidak mengurangi dampak pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 6 Hasil Uji moderasi 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	63.60493	28.15352	2.259218	0.0646
RETRIBUSI_DAE RAH	-1.407067	1.120582	-1.255657	0.2559
INFLASI	-11.06442	5.747403	-1.925117	0.1025
MODERASI2	0.435934	0.228275	1.909687	0.1048

Sumber: *Output Eviews 10, 2022*

Berdasarkan hasil uji MRA menunjukkan bahwa inflasi saat ini tidak menurunkan retribusi daerah pada pendapatan asli daerah dengan koefisien regresi nilai perkalian retribusi daerah dengan inflasi sebesar 0,435934 dan nilai signifikan sebesar 0,1048 > 0,05. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Inflasi tidak memoderasi pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penggunaan uji kepentingan simultan Eviews 10 (uji F) keberartian pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dibuktikan dengan F hitung 2197,399 > F tabel 4,7374 pada taraf signifikansi 5%. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Pertama menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan/bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 2011-2020 Daerah Tangerang Selatan.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian lain yang dilakukan dengan bantuan penggunaan (Samantha & Almalik, 2019) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah secara bersamaan memiliki dampak yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan studi yang dilakukan dengan bantuan penggunaan (Putri & Rahayu, 2019) menunjukkan bahwa secara bersamaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki dampak yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (Danied Mikha, 2010). Pendapatan unik regional

adalah pendapatan yang diperoleh dengan menggunakan tempat dan terakumulasi khususnya terutama didasarkan sepenuhnya pada aturan terdekat, yang bertujuan untuk menawarkan jangkauan terdekat untuk menemukan aset ekonomi lokal dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai bagian dari kesimpulan dari otonomi terdekat. desentralisasi. Oleh karena itu, tingkat pendapatan asli daerah sangat dirangsang dengan bantuan penggunaan dimensi penawaran pendapatan asli daerah.

2. Pengaruh Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penggunaan Eviews 10 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t) Pengaruh pajak lingkungan terhadap penjualan lingkungan dibuktikan dengan bantuan penggunaan t -depend fee $55.50390 > t$ desk 2.3646 dan nilai kepentingannya jauh lebih kecil dari $0,05$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Pajak Daerah sebagian berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Daerah Tangerang Selatan tahun 2011-2020.

Hasil dari pengamatan ini sejalan dengan hasil penelitian lain yang dilakukan dengan bantuan penggunaan (Meinanda & Larasati, 2021) yang menyatakan bahwa sebagian pajak daerah berdampak pada pendapatan asli daerah. Serta penelitian yang dilakukan dengan bantuan dana (Rizqy Ramadhan, 2019) hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah karena pajak daerah berperan dalam pembiayaan perbaikan daerah dan kontes belanja daerah. Pengeluaran ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan manusia, tanpa pajak lokal, pilihan jaringan sekitar untuk peningkatan sulit untuk dipenuhi karena keuntungan maksimum setiap area berasal dari pajak lokal. Secara tidak langsung, pajak terdekat sebenarnya akan berpengaruh pada penjualan terdekat karena salah satu properti ekonomi terdekat adalah pajak terdekat.

3. Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan penggunaan Eviews 10 Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji Statistik t) Dampak retribusi daerah terhadap penjualan lingkungan dibuktikan dengan bantuan penggunaan t -dhitung $4.013455 > t$ -tabel 2.3646 dan nilai kepentingannya jauh lebih kecil dari $0,05$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Retribusi Daerah sebagian berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang Selatan tahun 2011-2020.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang berbeda yang dilakukan dengan bantuan penggunaan (Rizqy Ramadhan, 2019) dan (Mulyana, 2018) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Dan penelitian yang dilakukan dengan bantuan penggunaan (Putri & Rahayu, 2019) menunjukkan bahwa Retribusi Daerah Secara Parsial memiliki dampak efektif yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah yang dimaksud adalah tagihan atas penawaran positif atau penawaran lain yang diberikan dan/atau diberikan dengan bantuan penggunaan pemerintah daerah untuk keuntungan orang atau badan. Pemerintah daerah menawarkan banyak pusat untuk setiap pria atau wanita dan kepentingan perusahaan. Setiap individu atau badan yang menggunakan pusat-pusat yang disediakan dengan bantuan menggunakan otoritas terdekat harus menawarkan tarif kepada otoritas terdekat untuk menggunakan pusat-pusat tersebut.

4. Inflasi sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji MRA, menunjukkan bahwa inflasi tidak mampu meringankan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan koefisien regresi perkalian Pajak Daerah dengan Inflasi $0,005974$ dan retribusi penting $0,7696 > 0,05$.

Hasil dari pengamatan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dengan bantuan penggunaan (Hidayati, 2018) yang menyatakan bahwa variabel inflasi tidak memiliki pengaruh ukuran penuh terhadap menyatakan bahwa variabel inflasi tidak memiliki dampak yang besar terhadap pendapatan pajak daerah karena biaya kepentingan menjadi lebih dari $0,05$. Namun, jauh berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh (Lumy et al., 2018) Hasil

Dila Angraini¹ dan Gyta Fitriandryany² : Inflasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tangerang Selatan
penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki dampak yang efektif dan menyeluruh terhadap pendapatan asli daerah, yang berarti bahwa jika inflasi meningkat, penerimaan pajak daerah bahkan dapat meningkatkan dan sebaliknya. Salah satu unsur yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah tingkat inflasi. Aspek inflasi merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan karena semakin baik tingkat inflasi maka semakin berat pula beban pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Stefanus, 2020).

Konsekuensi menegaskan bahwa inflasi sebagai variabel moderating tidak dapat melemahkan atau memperkuat dampak pajak lingkungan pada pendapatan asli daerah. Ketika inflasi terus meningkat, manusia akan tetap membayar pajak lingkungan karena pajak lingkungan bersifat memaksa, meskipun pendapatan manusia menurun karena meningkatnya biaya produk dan penawaran sehingga inflasi yang meningkat atau menurun tidak berpengaruh pada penjualan pajak lingkungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa spekulasi keempat ditolak yang menyatakan bahwa inflasi tidak mampu mengurangi dampak pajak daerah terhadap pendapatan daerah.

5. Inflasi sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji MRA menunjukkan nilai koefisien regresi perkalian Retribusi Daerah dengan Inflasi sebesar 0,435934 dan nilai signifikansi 0,1048 > 0,05. Hasil penelitian ini luar biasa dari yang dilakukan oleh (Martini et al., 2019) bahwa biaya inflasi memiliki dampak yang besar dan memberikan kontribusi yang pasti terhadap reputasi retribusi daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa inflasi sebagai variabel pemoderasi tidak dapat memberikan dorongan atau pelemahan terhadap Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tangerang Selatan. Inflasi Kota di Tangerang Selatan rata-rata 4,18% pada tahun 2011-2020 tergantung tingkat keparahannya, tergolong ringan. Inflasi tidak berdampak signifikan di kota Tangerang Selatan. Bank Indonesia masih mampu mengendalikan inflasi, sehingga tidak terlalu mempengaruhi perekonomian. Inflasi ini tidak mengurangi aktivitas keuangan masyarakat. Jaringan tetap menerapkan item retribusi yang berlaku sebagai bantuan untuk kegiatan keuangannya. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke-5 tinjauan ini ditolak yang menyatakan bahwa inflasi tidak mampu mengurangi dampak retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil kajian dan uji coba hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Untuk retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan. Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan. Inflasi ini tak meringankan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan. Dan Inflasi tidak Memoderasi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan.

Saran

1. Peneliti selanjutnya perlu mengunggah berbagai variabel atau elemen yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, bersama dengan modifikasi peraturan, situasi struktur keuangan dan sosial lokal, penyesuaian tarif, insentif, pengembangan usaha baru, dan tenaga pekerja.

2. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dapat meningkatkan kemampuan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan segala kegiatan yang ada di lingkungan pemerintah daerah, agar keuntungan khas daerah dapat meningkat dengan menggali potensi daerah dengan bantuan pemanfaatan dan pengembangan macam-macam pajak daerah sesuai dengan kepentingan daerah dan mengoptimalkan keuntungan khas daerah, khususnya penetapan kembali pajak daerah, retribusi daerah, pengaruh penguasaan barang daerah yang dipisahkan dan PAD yang sah lainnya, terutama untuk pajak dan retribusi daerah yang mempunyai daya tampung yang sangat baik di suatu tempat karena kepentingan kapasitas ini dekat dengan layanan yang dilengkapi dengan bantuan menggunakan otoritas terdekat untuk komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Tangerang Selatan

- Danied Mikha. (2010). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Emba*, 1, 1–22.
- Deno, A., Djou, L. D. G., & Ismail, N. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(2), 24–31.
- Duli, N. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- galih wicaksono, tree setiawan pamungkas. (2017). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Jember*. 9(1), 1–23.
- Guritno. (2008). *Teori Ekonomi Makro*. STIE YKPN, Yogyakarta.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Periode 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta*, 1(1), 1–9.
- Hidayati, S. D. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Permana*, IX(2), 1–117. <http://eprints.undip.ac.id/11604/1/2004MM2147.pdf>
- Kivits, R., & Sawang, S. (2021). Stakeholder Theory. *Contributions to Management Science*, 1–8. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70428-5_1
- Lumy, D. G., Kindangen, P., Engka, D. S. M., Ratulangi, U. S., Penduduk, J., & Daerah, P. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara |Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No.2 (2018)*. 19(2), 1–16.
- Martini, R., Pambudi, S. B., & Mubarak, M. H. (2019). Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 2(1), 90–95. <https://doi.org/10.46774/pptk.v2i1.95>
- Meinanda, R. F., & Larasati, A. Y. (2021). *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan Vol 15 No 2 Agustus 2021 Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan Volume 15 Nomor 2 , Agustus 2021 Hal 536-551 ISSN 2088-5008 537 | Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan Vol 15 No 2 Agustus 2021*. 15(2), 7–8.
- Mulyana, A. (2018). Analisa Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi*, 4(2), 1115–1122. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol4.iss2.2018.187>
- Nurasila, E., Yudhawati, D., & Supramono, S. (2020). Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Harga Saham Pada Sektor Industri Barang Dan Konsumsi. *Manager : Jurnal*

- Dila Angraini¹ dan Gyta Fitriandryany² : Inflasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tangerang Selatan
Ilmu Manajemen, 2(3), 389. <https://doi.org/10.32832/manager.v2i3.3714>
- Oktiani, A. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1), 16–35.
- Putri, M. E., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap the Effects of Local Tax and Local Retribution on. *Jurnal E-Proceeding of Management*, 2(1), 281–288.
- Putro. (2013). *Aplikasi Pengelolaan Publikasi Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Informatika*. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Rita Martini, S. B. P. M. H. M. (2018). *Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*. 2(2), 2016. <https://doi.org/10.1016/j.g>
- Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Ruswandi & Rina rahmawati. (2009). *Analisis Pengaruh pajak daerah tergadap pndapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang*.
- Samantha, R., & Almalik, D. (2019). Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. *Tjyybjb.Ac.Cn*, 3(2), 58–66. <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Stefanus, A. (2020). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)(Studi Pada Provinsi Di Sumatera Tahun 2016–2018). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad)*. <http://rama.mdp.ac.id:85/id/eprint/41>
- www.beritasatu.com
- www.tangselkota.bps.go.id
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945